

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan selama satu tahun. Sedangkan Rencana Strategis adalah rencana kerja selama 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi/instansi beserta pencapaiannya. Setiap organisasi atau instansi selayaknya mempunyai suatu dokumen perencanaan menyangkut kinerja organisasinya yang memiliki peran sebagai dasar tuntunan dalam penetapan kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan sehingga apa yang telah dijadikan tujuan organisasi/instansi dapat tercapai dan terkendali dengan baik.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Perkiraan capaian tahun berjalan. Semua kegiatan yang terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan keberhasilan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini.

Demikian RKPD Kesbangpol Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Purbalingga, 2024

KEPALA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA



PANDI, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 196907171991011003

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bakesbangpol Tahun 2023.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	64
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	65
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	79
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAKESBANGPOL	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	80
3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik-	81
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	83
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAKESBANGPOL	
.....	88
BAB V PENUTUP.....	112

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BAKESBANGPOL dan Capaian Rencana Kerja Tahun 2022-----	13
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BAKESBANGPOL dan Capaian Rencana Kerja Tahun 2023-----	17
2.3 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023-----	23
2.4 Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah-----	31
2.5 Pengukuran Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-----	39
2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023--	44
2.8 Reviu terhadap Rancancangan Awal terhadap hasil analisis kebutuhan-----	66
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021 – 2026-	
4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAKESBANGPOL Tahun 2025 dan Prakiraan maju Rencana Tahun 2026-----	89

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Pembinaan kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, dan dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPELITBANGDA dan pemangku kepentingan.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu **“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”**, yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 05);
- u. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 72);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109) ;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 109);

- x. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 127 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
- y. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

- a. Menyelaraskan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahun 2025;
- b. Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2022 dan 2023.

1.3.2. Tujuan

- a. Menjabarkan rencana strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026 ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan untuk 1 (satu) tahun 2025;
- b. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan politik tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK TAHUN 2023**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik dan
Capaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 109) pasal 2 huruf e nomor 5 telah ditetapkan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar melaksanakan urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun dasar hukum terkait tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga nomor 127 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Secara umum tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan BAKESBANGPOL;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan di bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta hambatan dan permasalahan yang di hadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan, berdasarkan perbandingan antara indikator dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebagai instrument penilaian.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 memiliki 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran serta 4 (empat) indikator Kinerja Utama dan telah memiliki pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2023. Sebagai upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis 2021-2026, pada Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menambahkan satu tujuan sehingga menjadi 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran serta 4 (empat) indikator Kinerja Utama. Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 serta target kinerja sampai dengan tahun 2024 seperti pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8 01 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100%	1	1	100%
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	2	2	100%	2	2	100%
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 ASN	13 ASN	20 ASN	13 ASN	100%	13 ASN	13 ASN	100%
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 dok		100%	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
		Pelaksanaan Tugas ASN												
8	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	3 dok	100%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata rata capaian SKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya peserta diklat	4 orang	0	2 orang	2 orang	100%	2 orang	2 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
		Kantor yang Disediakan												
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	31,9 per 10.000	8,76 per 10.000	2,66 per 10.000	2,92 per 10.000	109,76 %	31,9 per 10.000	31,9 per 10.000	100%
8 01 02 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan	Jumlah rekomendasi terkait Perumusan Kebijakan Teknis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
		Karakter Kebangsaan	dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang ditindaklanjuti										
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	100%
8	01	02	2.01	02	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Kordinasi di Bidang	4 keg	0	4 keg	4 keg	100 %	4 keg	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
		Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	900	900	900	900	100%	300	300	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
		Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	18 dok	18 dok	18 dok	18 dok	100%	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya	31,9 per 10.000	8,76 per 10.000	2,66 per 10.000	280,99 %	0,58 per 10.000	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
8	01	03	2.0 1		ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Politik					
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rekomendasi terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	100%		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	12 keg	12 keg	12 keg	12 keg	100%	12 keg	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi terkait pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
8 01 04 2.01 01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	4 keg	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	14 keg	6 keg	6 keg	6 keg	100%	10 keg	10 keg	100%
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	18 dok	18 dok	18 dok	18 dok	100%	18 dok	18 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Asing di Daerah								
8	01	05								
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								
		Cakupan masyarakat yang memperoleh pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	31,9 per 10.000	5,26 per 10.000	2,66 per 10.000	5,26 per 10.000	197,57 %	31,9 per 10.000	31,9 per 10.000	100%
8	01	05	2.01							
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								
		Jumlah rekomendasi terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8 01 05 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	900	600	600	600	100%	900	900	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8 01 06 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan bulanan potensi kerawanan sosial dan Jumlah laporan deteksi dini konflik yang terjadi di wilayah	24 keg	24 keg	24 keg	24 keg	100%	24 keg	24 keg	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8 01 06 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 keg	12 keg	12 keg	12 keg	100%	12 keg	12 keg	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	900	900	900	900	100%	900	900	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 dok	18 dok	18 dok	18 dok	100%	18 dok	18 dok	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%

Beberapa program dan kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Purbalingga diatas tidak dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan potensi konflik sosial di Masyarakat di atas target terjadinya potensi konflik yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi adalah telah masuknya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, Dimana suhu politik dalam negeri cenderung memanas. Peningkatan potensi konflik sosial di masyarakat memiliki risiko timbulnya konflik yang meluas;
2. Cakupan Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan belum tercapai sesuai target. Hal ini disebabkan penyelenggaraan Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan masih menggunakan metode sosialisasi formal berdasarkan ketersediaan anggaran. Idealnya pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dapat dilaksanakan di tengah-tengah kegiatan masyarakat sehari-hari baik melalui selebaran, siaran radio, keramaian pasar, penyampaian dalam upacara bendera di sekolah-sekolah, dan sebagainya. Risiko dari tidak tercapainya target cakupan Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan adalah menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, meningkatnya potensi konflik sosial, penyalahgunaan narkoba dan potensi tumbuhnya paham radikalisme, dan tidak tercapainya target IKU Bakesbangpol.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dari 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51 % ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

- b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Rendah
2.	76% ≤ 90%	Rendah
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51 % ≤ 65%	Tinggi
5.	≤ 50%	Sangat Tinggi

Berikut ini diuraikan *Capaian Kinerja* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023.

a. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	%
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat		Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	83,03	95	92,96	97,85
	Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Rasio	N/A	31,9	2,63	8,24
	Meningkatnya Implementasi SAKIP KESBANGPOL	Nilai SAKIP	Indeks		72	73,01	101,40
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik masyarakat	Persen		0,28	0,28	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	%
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat		Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	83,03	95	92,96	97,85
		Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen		0,16	0,16	100
Rata-rata Capaian Kinerja							81,50

Dari tabel di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga di tahun 2023 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 81,50 % atau kategori **Tinggi**

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga diukur berdasarkan hasil pencapaian *sasaran* pada akhir tahun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam *rencana strategis (RENSTRA)* SKPD.

1. Indikator Kinerja Utama Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik dengan target indikator 95% dan realisasi **92,96%** dengan tingkat kemajuan 97,85% didukung oleh:

- a) Adanya deteksi dini potensi konflik masyarakat yang telah diterapkan sampai dengan level pemerintahan desa/kelurahan
- b) Adanya Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan *stakeholder* melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Agen Kewaspadaan Dini Daerah;
- c) Penggunaan Sistem Informasi Kewaspadaan Dini Daerah (SIWASDINDA).

Capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 95%. Hal ini disebabkan tingginya potensi konflik yang ada di Kabupaten Purbalingga, yaitu sebanyak 71 potensi konflik, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 45 potensi konflik. Tingginya potensi konflik di tahun 2023 dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- a) Pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19, sehingga banyak tumbuh usaha-usaha yang dikelola masyarakat yang kurang memperhatikan dampak lingkungan, seperti peternakan dan pertambangan galian C;
 - b) Memasuki tahun politik yaitu telah dimulainya tahapan pemilu 2024. Tahapan pemilu 2024 menyumbang potensi konflik terbesar yaitu sebanyak 12 dari 71 potensi yang ada;
 - c) Masih adanya potensi konflik internal kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berimbas kepada ancaman ketertiban umum dan gesekan antar ormas.
2. Indikator Kinerja Utama Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik dengan target indikator 31,9 dan realiasi 2,63 dengan tingkat kemajuan 8,24% didukung oleh adanya sosialisasi penanganan konflik sosial kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh wanita pada wilayah yang memiliki potensi konflik tinggi.
3. Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP dengan target indikator 72 dan realisasi 73,01 dengan tingkat kemajuan 101,40% didukung oleh adanya komitmen pimpinan dan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP Kesbangpol;

4. Indikator Kinerja Utama Cakupan pendidikan politik masyarakat dengan target indikator 0,28 dan realisasi 0,28 dengan tingkat kemajuan 100% didukung oleh:
- Terselenggaranya Pendidikan Politik Masyarakat dengan sasaran pemilih pemula usia 16 s.d. 17 tahun di satuan pendidikan menengah atas dan kejuruan;
 - Adanya koordinasi yang baik dengan lembaga pendidikan menengah dan kejuruan dalam upaya melaksanakan pendidikan politik kepada siswa SMA/SMK.
5. Indikator Kinerja Utama Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan dengan target indikator 0,16 dan realisasi 0,16 dengan tingkat kemajuan 100% didukung oleh:
- Terselenggaranya Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan sasaran penduduk usia produktif;
 - Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait serta Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

Realisasi atas indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun terakhir sebagaimana rincian pada tabel berikut

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan dan partisipasi politik Masyarakat		Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	N/A	N/A	N/A	95,12	92,96

	Meningkatkan Implementasi SAKIP KESBANGPOL	Nilai SAKIP KESBANGPOL	Indeks	N/A	N/A	65	71,16	73,01
	Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Potensi	N/A	12	7	41	71,00
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik masyarakat	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0,60
		Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0,13

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut

1. Capaian Indikator Tujuan

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat mendapatkan nilai rata-rata **92,96%** dengan kategori **tinggi**. Capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 95%. Hal ini disebabkan tingginya potensi konflik yang ada di Kabupaten Purbalingga, yaitu sebanyak 71 potensi konflik, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 45 potensi konflik. Tingginya potensi konflik di tahun 2023 dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- a) Pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19, sehingga banyak tumbuh usaha-usaha yang dikelola masyarakat yang kurang memperhatikan dampak lingkungan, seperti peternakan dan pertambangan galian C;
- b) Memasuki tahun politik yaitu telah dimulainya tahapan pemilu 2024. Tahapan pemilu 2024 menyumbang potensi konflik terbesar yaitu sebanyak 12 dari 71 potensi yang ada.

c) Masih adanya potensi konflik internal kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berimbas kepada ancaman ketertiban umum dan gesekan antar ormas.

Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman, dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dan Partisipasi Politik Masyarakat 5 tahun terakhir (2019 s.d 2023)

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2023		
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan dan partisipasi politik Masyarakat	Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Person	N/A	N/A	N/A	95,12	95	92,96	97,85

Tujuan ini mendukung pencapaian misi kedua Bupati Purbalingga yaitu :

Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dari keragaman yang ada, potensi konflik yang sering terjadi di Kabupaten Purbalingga secara umum tidak ada konflik SARA yang terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga dan situasi kondisi pun tetap kondusif. Adapun beberapa isu konflik yang terjadi pada tahun 2023 antara lain :

- Galian C;
- Ketidakpuasan warga terhadap kinerja perangkat desa;
- Sengketa internal organisasi kemasyarakatan;
- Keberadaan aliran ajaran agama yang dianggap menyimpang.

Selanjutnya dalam rangka mencapai target kinerja tujuan tersebut, langkah – langkah strategis yang telah ditempuh adalah:

- a) Optimalisasi sasaran program penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan melaksanakan sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Pembentukan Desa Pelopor Pancasila yaitu Desa Langgar Kecamatan Kejobong, Desa Babakan dan Desa Bojanegara Kecamatan Padamara;
- b) Optimalisasi pemantauan kegiatan WNA dan NGO di masyarakat, agar dapat dilakukan antisipasi jika ada kegiatan yang mengarah pada penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan potensi ke kriminal;
- c) Memperkuat kelembagaan FKDM sebagai upaya memperkuat deteksi dini dan cegah dini terhadap segala kemungkinan masalah IPOLEKSOSBUDKAM;
- d) Optimalisasi koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- e) Optimalisasi koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- f) Meningkatkan fasilitasi forum kemitraan FKUB, meningkatkan sosialisasi Kerukunan Hidup Beragama, sosialisasi moderasi beragama, sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pendirian rumah ibadah dan sosialisasi wawasan kebangsaan serta pembauran kebangsaan;
- g) Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan keormasan;
- h) Fasilitasi kegiatan ormas;
- i) Memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai berita hoax, melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh keagamaan.

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Capaian Indikator kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Implementasi SAKIP KESBANGPOL	Nilai SAKIP KESBANGPOL	Indeks	72	73,01	101,4
Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Potensi	45	71,00	35
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik Masyarakat	Persen	0,28	0,28	100
	Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	0,16	0,16	100

Capaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dijelaskan secara rinci dengan membandingkannya dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas kelembagaan KESBANGPOL

Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kelembagaan Kesbangpol” nilai capaian SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 mendapatkan nilai 73,01 melampaui target tahun 2023 yaitu 72, atau sebesar 101,4% (Sangat Tinggi) dengan predikat “BB” (Sangat Baik), yang berarti bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kerjanya sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Tabel 2.7

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kelembagaan Kesbangpol
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2023		
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Implementasi SAKIP KESBANGPOL	Nilai SAKIP KESBANGPOL	Indeks	N/A	N/A	65	71,16	72	73,01	101,4

Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	6,00	6,30	10,50	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,80	6,30	10,50	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,70	3,15	5,25	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	5,25	8,75	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	17,00	21,00	35,00	73,01

1) Hambatan/Kendala yang Dihadapi

Beberapa Hambatan/kendala dalam pencapaian target kinerja sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

- dokumen Perencanaan Kinerja pada aspek kualitas sebagian besar criteria telah terpenuhi namun belum seluruh Pegawai Bada Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga menyusun Perjanjian Kinerja bulanan dan Laporan Capaian Kinerja Bulanan pada aplikasi e-kinerja secara tertib dan tepat waktu
- Seluruh Pegawai sudah mengisi Aplikasi Pengukuran Kinerja (e-kinerja) dan print out e-kinerja telah ditandatangani atasan namun belum seluruhnya diverifikasi atasan pada aplikasi e-kinerja
- aplikasi e-kinerja belum dimanfaatkan secara optimal
- belum ada aplikasi e-sakip Kabupaten yang digunakan untuk pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja
- SKP Pegawai belum sepenuhnya selaras dengan atasan
- Kegiatan Rapat Penyusunan LKjIP telah dilaksanakan namun informasi dalam dokumentasinya belum memadai

2) Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi SAKIP diantaranya:

- Memerintahkan seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar menyusun Perjanjian Kinerja bulanan dan Laporan Capaian Kinerja bulanan pada aplikasi e-kinerja secara tertib dan tepat waktu secara selaras dengan atasan;
- Melaksanakan sekaligus memerintahkan kepada Pejabat untuk melakukan verifikasi atasan pada mekanisme pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja;
- Memanfaatkan aplikasi e-Kinerja lebih optimal;
- Berkoordinasi dengan instansi terkait (Bagian Organisasi Setda) untuk mendorong pembuatan dan penggunaan aplikasi e-sakip kabupaten yang digunakan untuk pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja
- Meningkatkan pengendalian terhadap pengukuran kinerja pegawai, terutama keselarasan SKP antar lini vertical
- melaksanakan seluruh rekomendasi tim evaluator SAKIP.

b. Menurunnya Potensi Konflik di Masyarakat

Capaian kinerja sasaran strategis Menurunnya potensi konflik di Masyarakat dengan indikator kinerja Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik pada tahun 2023 sebesar 35% dari target 31,9%/10.000 penduduk, hanya tercapai 2,92%/10.000 penduduk. atau **Sangat Rendah**. Hal ini disebabkan formulasi yang digunakan adalah penduduk yang mendapatkan sosialisasi pencegahan konflik sosial dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Data capaian kinerja sasaran dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8.

Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Potensi Konflik di Masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2023		
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Capaian Kinerja
Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Potensi	N/A	N/A	N/A	8,76	31,9	2,92	35

Potensi konflik sosial yang dilaporkan di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 41 potensi menjadi 71 potensi konflik di tahun 2023. Kenaikan potensi konflik ini telah diprediksi sebelumnya berdasarkan analisis terhadap potensi perkembangan kerawanan sosial yang mungkin terjadi pasca pandemi Covid-19 dan dimulainya tahapan pemilu 2024. Dari 71 potensi konflik yang muncul di masyarakat sebanyak 66 potensi konflik dapat diredam tidak menjadi konflik, dan sebanyak 5 (lima) potensi konflik tidak dapat diredam melalui jalur mediasi dan musyawarah mufakat, kemudian berkembang menjadi konflik berupa aksi unjuk rasa. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa cakupan tangkal dini konflik sosial pada tahun 2023 adalah

Kenaikan potensi konflik pada tahun ini dapat di jelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.9.
Potensi Konflik yang dilaporkan

No	Kecamatan	Jenis Potensi Konflik																						Jumlah					
		Ideologi				Politik						Ekonomi						Sosial			Budaya								
		Radikal	Tempat Ibadah	Keagamaan	Ideologi Lain	Parpol	Ormas	Pilkades	Perangkat Desa	Pemilu	Pemerintahan	Tower	Galian C	Perusahaan	Peternakan	Pertanian	Buruh	Perdagangan	Pertanahan	PKL	Lain2	Batas Desa	Bansos		Olahraga	Prostitusi	Seni Budaya	Kepercayaan	Tempat Hiburan
1	Kemangkon			1		1					1		1																4
2	Kertanegara					1	1			1			1						1			1							6
3	Bojongsari									1												1							2
4	Purbalingga									1			1	1	1	1	1	1											7
5	Kejobong																					1							1
6	Pengadegan																												0

Apabila dihitung capaian penurunan angka konflik sosial pada tahun 2023 adalah sebesar 0,058 dengan perhitungan 6 kejadian per 10.000 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga, maka capaian tersebut sangat tinggi. Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023 sebanyak 1.027.521 jiwa. Pada Tahun 2023 potensi konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga sebanyak 71 potensi konflik. Dari 71 potensi konflik yang muncul di masyarakat sebanyak 66 potensi konflik dapat diredam tidak menjadi konflik, dan sebanyak 5 (lima) potensi konflik tidak dapat diredam melalui jalur mediasi dan musyawarah mufakat, kemudian berkembang menjadi konflik berupa aksi unjuk rasa.

Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Angka Konflik Sosial} &= \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial} \times 10.000}{\text{Jumlah Penduduk}} \\ &= \frac{5 \times 10.000}{1.027.521} \\ &= 0,048 \end{aligned}$$

Menurunnya Angka Konflik Sosial dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.10.

Menurunnya Angka Konflik Sosial

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target Akhir
		2018	2019	2020	2021	2022				
Angka Konflik sosial per 10.000 Penduduk	Angka	0,116	0,084	0,119	0,069	0,029	0,058	0,048	120,83	100
Rata – rata Capaian Kinerja									120,83	

Dari tabel tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa konflik Poleksosbud di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 0,029 menjadi sebesar 0,048 di tahun 2023

Kenaikan konflik pada tahun ini dapat di jelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.11.
Rekap Kejadian Konflik Tahun 2023

No	Tanggal	Keterangan
1.	22 November 2023	Aksi mogok kerja karyawan PT. John Toys di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon terkait tertundanya pembayaran gaji karyawan.
2.	17 Juni 2023	Penolakan warga Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon atas aktivitas penambangan galian C menggunakan alat berat
3.	7 Mei 2023	Aksi Penolakan warga Desa Arenan Kecamatan Kaligondang atas aktivitas penambangan galian C menggunakan alat berat
4.	29 Agustus 2023	Unjuk rasa warga Desa Brecek Kecamatan Kaligondang menuntut pemberhentian Sekretaris Desa disebabkan ketidakpuasan warga atas pelaksanaan pembangunan talud
5.	24 Januari 2023	Aksi masa PSHT di alun-alun Purbalingga menuntut penindakan atas penggunaan hak paten oleh organisasi kemasyarakatan lain tanpa ijin.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target yang telah di tetapkan telah tercapai, hal ini dikarenakan konflik yang terjadi mengalami penurunan menjadi adalah 5 (lima) kejadian. Adapun penyebab yang paling dominan dari potensi konflik di tahun 2023 adalah adanya penggunaan alat berat pada pertambangan Galian C. Penggunaan alat berat pada pertambangan Galian C ditakutkan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar pertambangan diantaranya tergerusnya lahan warga yang berada di sekitar area pertambangan, dan rusaknya akses jalan yang dilalui kendaraan pengangkut hasil tambang.

Dengan capaian yang hanya sebesar 63,8% perlu adanya langkah langkah antisipatif yang harus ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar potensi konflik yang dilaporkan dapat diredam tidak berkembang menjadi konflik, dan capaian kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Dalam upayanya untuk menurunkan konflik di Kabupaten Purbalingga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga selaku perangkat daerah yang menangani permasalahan konflik sosial telah menempuh langkah-langkah antara lain :

- a) Membentuk dan memfasilitasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Purbalingga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- b) Melaksanakan kegiatan fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Purbalingga guna mendapatkan penyelesaian diantara pihak-pihak yang bermasalah;
- c) Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Konflik Sosial ke masyarakat bersama instansi terkait. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang setiap saat bisa muncul seiring dinamika sosial masyarakat yang setiap waktu berubah dan berkaitan erat dengan fenomena sosial yang terjadi saat itu;
- d) Memberdayakan masyarakat utamanya para tokoh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan cegah dini melalui wadah *Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat* (FKDM). Hal ini diantaranya dilakukan melalui pertemuan operasional FKDM sebagai wahana menggali informasi, menyikapi dan mengevaluasi dinamika situasi kondisi daerah setempat;

- e) Memberdayakan para tokoh agama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama melalui wadah Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB). Hal ini diantaranya dilakukan melalui pertemuan FKUB sebagai sarana silaturahmi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul antar umat beragama, serta menyikapi dinamika sosial masyarakat yang setiap waktu berubah dengan cepat yang dapat mempengaruhi kehidupan umat beragama;
- f) Memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk turut serta menjaga kerukunan dan meminimalisir potensi konflik SARA;
- g) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba melalui penyuluhan P4GN di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk meminimalisir kasus narkoba yang dapat berakibat pada permasalahan sosial dan kriminal;
- h) Membentuk dan memfasilitasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- i) Mengadakan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Organisasi Kemasyarakatan;
- j) Mengadakan sosialisasi pemantapan faham Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan pembentukan Desa Pelopor Pancasila;
- k) Memberdayakan dan mengembangkan Agen Kewaspadaan Dini Daerah (AWASDINDA) yang saat ini beranggotakan perangkat desa pada desa-desa yang memiliki tingkat kerawanan tinggi maupun sedang di bawah koordinasi Kasi Pemtrantibum Kecamatan. AWASDINDA ini bertujuan melaporkan potensi konflik yang terjadi di wilayah masing-masing agen kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial untuk mendapatkan rekomendasi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi konflik.

c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri

Capaian Kinerja sasaran strategis ” *Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri*” dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat dan Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Pada indikator kinerja 1 yaitu Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat mendapatkan nilai rata-rata 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 0,28% dari jumlah penduduk usia 16-17 tahun. dengan kategori **Sangat Tinggi**. Untuk indikator kinerja 2 yaitu Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan mendapatkan nilai rata-rata 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 0,16 dari penduduk usia produktif, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12.
Capaian Kinerja

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kehidupan Berdemokrasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2023		
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Capaian Kinerja
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik masyarakat	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0,28	0,28	100
	Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0,16	0,16	100

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik

Menurut Miriam Budiarjo secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan menurut Keith Faulks partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi, yang penting partisipasi merupakan proses aktif. Jadi dapat disimpulkan partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ada beberapa bagian yang turut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat antara lain adalah:

- a) KPUD. Sebagai penyelenggara Pemilu KPUD memiliki peran utama meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut termuat dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 10 menyebutkan bahwa: “Salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan sosialisasi dan penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat”.¹⁷ KPUD meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui cara sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat. Cara tersebut dilakukan melalui tiga tahapan yakni melalui komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media, dan melalui mobilisasi sosial.
- b) Partai politik dalam UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 10 disebutkan: “tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Selanjutnya dalam pasal 11 dijelaskan: “partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sosialisasi dan pendidikan politik oleh Partai Politik sedikitnya dilakukan dalam tiga hal, yakni: melalui sosialisasi para kader, pendidikan politik, dan melalui optimalisasi organisasi sayap partai.
- c) Media massa. Di era globalisasi seperti saat ini, media memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Melalui media, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih mudah. Begitu juga dalam Pemilukada, media menjadi saluran komunikasi yang sangat tepat untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang netral, saat ini media menjadi salah satu lembaga yang sangat dipercayai oleh masyarakat. Dengan begitu, dalam peningkatan partisipasi masyarakat media diharapkan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mau menggunakan hak pilinya dalam Pemilukada. Terdapat tiga media yang sangat efektif digunakan dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Purbalingga yaitu: stasiun televisi Banyumas TV, Lembaga Penyiaran Suara Perwira dan Koran Radar Banyumas.

d) *Civil Society*. Organisasi masyarakat yang banyak bergerak dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Pemuda Pancasila dan Persatuan Ketua Rukun Tetangga. Keempat lembaga sosial tersebut pada intinya memiliki cara yang sama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Yakni melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan melibatkan banyak lembaga sosial tersebut diharapkan masyarakat dari berbagai elemen terdorong untuk berpartisipasi

Peran pemangku kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik pada akhirnya telah terjawab dengan adanya keberhasilan jalannya Pemilu pada Tahun 2020 sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU. Berdasarkan penghitungan KPU terlihat dari 746.001 daftar pemilih yang termuat dalam DPT, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya adalah 544.750 atau sebesar 73%.

Partisipasi politik dalam Pemilu pada tahun 2020 merupakan pencapaian partisipasi politik yang paling tinggi jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat sebesar 12% apalagi pelaksanaan pemilu pada tahun 2020 dilaksanakan ditengah pandemic *Covid-19*. Untuk di Jawa Tengah Pemilu pada tahun 2020 partisipasi pemilih sebesar 74,34%. Dengan perolehan tertinggi adalah Kabupaten Boyolali sebesar 89,53%, sedang terendah adalah Kabupaten Grobogan sebesar 63,55%.

Sehingga dari hal tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Purbalingga bisa dikatakan tidak tertinggal jauh dengan raihan tingkat Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, beberapa pihak menilai bahwa pencapaian angka 73% itu tidak bisa menjadi ukuran partisipasi politik masyarakat. Hal itu dikarenakan angka tersebut didapat dari hasil hitung- hitungan dari DPT yang ada. Sedangkan jumlah DPT itu sendiri tidak sesuai dengan jumlah real yang ada di masyarakat. Permasalahan DPT memang menjadi masalah yang selalu hadir dalam pemilihan umum.

Tingkat ketidakhadiran di TPS dalam Pemilu pada tahun 2020 mencapai 26,98%. Namun menurut banyak pihak angka ini tidak berarti menunjukkan bahwa 26,98% masyarakat itu semuanya apatis. Ada banyak alasan yang mengakibatkan orang tidak menggunakan hak pilihnya yang dapat dikarenakan :

- a) Sebagian dari DPT sedang bekerja di luar kota dan banyak mahasiswa yang sedang menempuh studi di luar kota yang tidak sempat pulang pada hari pencoblosan;
- b) Pemilih manula dan pemilih disabilitas yang sudah tidak mungkin bisa datang ke TPS masih masuk ke daftar DPT;
- c) Adanya wabah covid-19 yang mempengaruhi orang untuk datang ke TPS;
- d) Masyarakat yang tidak datang karena benar-benar apatis.

Pada pemilu 2024, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Purbalingga. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan strategis "*Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi*" dengan sasaran strategis *Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat* diwujudkan dalam program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, mengagendakan kegiatan Pendidikan politik baik melalui partai politik melalui hibah bantuan keuangan partai politik dengan komposisi penggunaan hibah sebesar 60% untuk Pendidikan politik masyarakat, maupun sosialisasi langsung dengan sasaran pemilih pemula dan pemilih perempuan. Selain itu, bersama dengan KPUD, Bawaslu Kabupaten Purbalingga, dan Pengamat Politik FISIP UNSOED bersinergi dalam pencapaian tujuan Bersama yaitu meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan kegiatan secara rutin melaksanakan diskusi interaktif di media penyiaran pemerintah yaitu RRI Programa 1 Purwokerto dengan tajuk "*Dialog Lintas Pagi Purwokerto*" yang juga direlay oleh Radio Gema Sudirman Purbalingga. Kesbangpol Purbalingga juga dilibatkan dalam program kegiatan Bawaslu yaitu pembentukan Desa Anti Politik Uang (Desantiku) dengan sasaran desa-desa di wilayah Kabupaten Purbalingga yang dipandang memiliki riwayat kehidupan demokrasi yang kurang sehat, terutama terdapat kasus politik uang yang menonjol dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Desa.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui perangkat daerah terkait juga terlibat secara aktif dalam upaya menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 antara lain :

- a) Fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik dalam rangka melibatkan peran ormas/orsospol guna menggandeng masyarakat lebih aktif/proaktif dalam pelaksanaan Pemilu sebagai pemilih;

- b) Menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi melalui forum koordinasi pimpinan daerah/muspida, tokoh agama, tokoh masyarakat dan segenap elemen masyarakat;
- c) Sosialisasi kepada warga masyarakat umum pada momen kegiatan kemasyarakatan yang rutin dilaksanakan, seperti Subuh Berjamaah, Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Gotong Royong. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan pada setiap kesempatan lainnya yang dihadiri langsung oleh Kepala Daerah, maupun Kepala Wilayah seperti Camat/Lurah;
- d) Melalui media elektronik seperti Lembaga Penyiaran Lokal "Suara Perwira", facebook resmi Pemkab Purbalingga (Dinkominfo dan Humas Protokol Purbalingga);
- e) Mengadakan Pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu penduduk usia 16 s.d.17 tahun bekerjasama dengan SMA dan SMK di Kabupaten Purbalingga.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut adalah :

- a) Masyarakat merasa partisipasi mereka tidak akan memberikan perubahan berarti bagi kehidupan mereka terutama dari segi sosial dan ekonomi;
- b) Masyarakat kurang mampu memahami dinamika serta proses politik yang terjadi, sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan cenderung apatis terhadap politik atau Pemilu;
- c) Masih marak dan membudayanya praktik *money politic*, sehingga ada anggapan di masyarakat pada umumnya kapan lagi mendapatkan uang dari kontestan pemilu kalau bukan pada saat mereka membutuhkan hak pilih masyarakat, maka apabila tidak dikasih uang untuk memilih dalam pemilu, mereka tidak akan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya;
- d) Belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula

Solusi yang dilakukan adalah :

- a) Diadakan sosialisasi, fasilitasi, peningkatan pendidikan politik masyarakat khususnya melalui peran partai politik.
- b) Melaksanakan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Ormas, pemilih perempuan, dan pemilih pemula);
- c) Melaksanakan Penguatan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Ormas, pemilih perempuan, dan pemilih pemula);
- d) Melaksanakan FGD Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat kepada Pelajar, Mahasiswa, dan Ormas;

- e) Melaksanakan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pilkada kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Unsur Penyelenggara Pilkada, Ormas, pemilih perempuan, dan pemilih pemula);
- f) Melaksanakan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada kepada aparat pemerintah yang menangani Pemilu;
- g) Melaksanakan Monitoring / Pemantauan dampak politik Pemilu.
- h) Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pendidikan bela negara dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air.

Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat berikut ini :

Tabel 2.13.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Tahun 2025	Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tujuan I : Mewujudkan peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam masyarakat														
1	Indeks Toleransi			3	3,7	3,4	4,3	4,3	2,23	1	0	4,3	4,3	
Sasaran I. Meningkatkan ketertiban, keamanan dan perlindungan Masyarakat														
2	Angka konflik Poleksosbud dan Sara per 10.000			30	50	45	60	30	7	5	5	60	30	
Tujuan II : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi														
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilukada, Pemilu, Pilpres)			72,3	0	0	75	0	0	0	0	75	0	
Sasaran II : Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik Masyarakat														
4	Prosentase pemilih dalam pemilu			72,3	0	0	75	0	0	0	0	75	0	

2.4. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan melaksanakan pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan ketatausahaan. Pemetaan permasalahan pelayanan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.14.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Demokrasi dan Politik	Berubahnya cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Demokrasi	<p>Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme</p> <p>Masih adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi</p> <p>Masifnya pengaruh budaya asing sebagai dampak globalisasi, telah mempengaruhi rasa nasionalisme dan kebangsaan generasi muda. Seiring derasnya arus informasi dan masuknya budaya asing, telah merubah mental, sikap dan perilaku generasi muda dalam memahami wawasan kebangsaan.</p> <p>Menurunnya tingkat moderasi dan toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan</p> <p>Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial</p>

			Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di masyarakat.
		Kuranginya pemahaman masyarakat terhadap politik	Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
			Belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dibanding nasional.
			Masih terjadinya money politik dalam pelaksanaan pemilu
			Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik secara kuantitas maupun kualitas
2.	Penatausahaan administrasi yang belum optimal	Lemahnya tingkat pemahaman penatausahaan dan administrasi	Rendahnya pemahaman tentang peraturan sistim dan prosedur penata usahaan dan administrasi..
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas internal. hal ini disebabkan belum mmemahami standar operasional prosedur kerja.
			Terbatasnya sarana dan prasarana yang ideal dalam menunjang aktivitas pekerjaan. hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas

2.5. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025

1. Rancangan Akhir RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan akhir rencanan kerja perangkat daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.
2. Review terhadap rancangan akhir RKPD tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat di lihat pada tabel 3.10. sebagai berikut :

Tabel 2.15
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kab. Purbalingga			7.031.629.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kab. Purbalingga			7.031.629.000	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				7.031.629.000	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				7.031.629.000	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				7.031.629.000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				7.031.629.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.582.279.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.582.279.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.400.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.400.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.000.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.400.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.957.911.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.957.911.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.814.111.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	1.814.111.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	70.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180 Dokumen	70.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	73.800.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	73.800.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7.800.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	7.800.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	7.800.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	15.000.000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah				117.900.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				117.900.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	12.000.000					12.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000	

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	7.200.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	7.200.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				270.268.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				270.268.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	400.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.320.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.320.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208.548.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208.548.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				208.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				208.000.000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	190.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	190.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	10.000.000	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				650.500.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				650.500.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				650.500.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				650.500.000	

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	12 Dokumen	18.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	12 Dokumen	18.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	549 Orang	158.500.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	549 Orang	158.500.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	2.500.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	2.500.000	

							dan Sejarah Kebangsaan			
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.744.850.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			1.744.850.000	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.744.850.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.744.850.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Orang	1.702.350.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Orang	1.702.350.000

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	327 Orang	40.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	327 Orang	40.000.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	2.500.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	18 Laporan	2.500.000

	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				611.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				611.500.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				611.500.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				611.500.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	209.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	209.000.000	

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1000 Orang	400.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1000 Orang	400.000.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	2.500.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	2.500.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				177.500.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				177.500.000

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				177.500.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				177.500.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	30.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	900 Orang	130.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	900 Orang	130.000.000	

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	280 Orang	15.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	108 Orang	15.000.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	2.500.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	2.500.000

	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.265.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.265.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				1.265.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				1.265.000.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	435.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	435.000.000	

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	108 Orang	500.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2880 Orang	500.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	65.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	65.000.000	

	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	265.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	265.000.000
--	---	---	--	------------	-------------	---	---	--	------------	-------------

a. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian diatas, satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Purbalingga tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
					Tidak ada program/kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya pada tugas-tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan nasional

Dalam upaya Menciptakan bentuk sinkronisasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka diharapkan program/kegiatan yang telah direncanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga merupakan implementasi dari program nasional yang bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sesuai dengan Misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yaitu

Misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang merupakan upaya-upaya untuk mewujudkan visi, sesuai dengan Misi Pertama dan Kedua Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

“Memperkuat Implementasi Ideologi Pancasila untuk menjaga Kebhinekaan, Persatuan dan Kesatuan, Demokratisasi, serta karakter kebangsaan dan stabilitas politik dalam negeri”

Sasaran Program Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi, dengan indikator sasaran strategis sebagai tolak ukur ketercapaian Sasaran Strategis, meliputi:
 - a. Indeks Demokrasi Indonesia;
 - b. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu
 - c. Indeks Kinerja Ormas.
2. Simpul Strategis Pembumih Pancasila Berjalan Optimal, dengan indikator sasaran strategis sebagai tolak ukur ketercapaian Sasaran Strategis, meliputi:
 - a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi;
 - b. Indeks Capaian Revolusi Mental;
 - c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; dan
 - d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
3. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dengan indikator sasaran strategis sebagai tolak ukur ketercapaian Sasaran Strategis yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional; dan
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya

Guna mencapai keselarasan visi dan misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga mengambil peranan strategis dalam:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pembinaan hubungan dengan Partai Politik, Partai Politik peserta Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Instansi maupun Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem politik ;
- c. Pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela Negara, dan pembinaan kerukunan umat beragama ;
- d. Pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasayarakatan;
- e. Pembinaan pembauran bangsa serta pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan/ atau LSM asing ;
- f. Pengumpulan data dan informasi di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya untuk dikaji sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah dalam menciptakan suasana yang aman dan damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. Mengadakan suatu perencanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

Sebagai upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu ***“Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia”***.

ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang professional, efektif, inovatif bersih, akuntable dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasar Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari ke tujuh misi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Peraturan Bupati No 98 Tahun 2016 mendukung misi kedua yaitu “ *Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasar Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam kurun tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut : ” **Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat”**.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Menurunnya potensi konflik dimasyarakat
- b. Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri

Berikut kami sajikan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KESBANGPOL KABUPATEN PURBALINGGA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat		Persentase potensi konflik sosial yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	95,30
	Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Rasio	31,9
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik Masyarakat	Persen	0,32
		Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	0,20
Meningkatnya kualitas kelembagaan BAKESBANGPOL		Nilai kematangan Perangkat Daerah	Nilai	43
	Meningkatnya implementasi SAKIP BAKESBANGPOL	Nilai SAKIP BAKESBANGPOL	Nilai	73,10

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun 2025 rencana program prioritas Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga diuraikan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 46 sub kegiatan, antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
4. Pembentukan Paskibraka
5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**
- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- 6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**
- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
5. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 yang dapat di lihat pada tabel 4.1, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dan Prakiraan maju Rencana Tahun 2026 sebagai berikut :

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Purbalingga**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)
					PROGR AM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIAT AN				TOLOK UKUR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						7.214.629.00 0					7.703.857.0 00
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						7.214.629.00 0					7.703.857.0 00
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						7.214.629.00 0					7.703.857.0 00
1,	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja</i>	Kab. Purbaling ga, Purbaling ga, Purbaling ga Lor	100 persen			2.490.154.00 0			<i>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja</i>	100 persen	2.699.978.0 00
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan</i>	Kab. Purbaling ga, Purbaling ga, Purbaling ga Lor		7 Dokumen		3.245.000			Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	7 Dokumen	5.000.000
	8.01.01.2.01.0 001	Penyusunan Dokumen											

		Perencanaan Perangkat Daerah											
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>			7 Dokumen		1.417.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.000.000
	8.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			5 Laporan		1.828.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.000.000
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran Yang Ditindak Lanjuti</i>	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor		100 %		1.903.711.000			Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran Yang Ditindak Lanjuti	100 %	2.035.000.000
	8.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 Orang/bulan	1.814.111.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.900.000.000
8.01.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				24 Dokumen	53.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	60.000.000
8.01.01.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				2 Dokumen	36.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	75.000.000

	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan</i>	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor		100 persen		3.900.000			Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100 persen	7.800.000
	8.01.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>			2 Laporan		3.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.800.000
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tersediannya Pendidikan dan Diklat Bagi ASN dan THL</i>	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor		20 persen 4 Orang		15.000.000			Persentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tersediannya Pendidikan dan Diklat Bagi ASN dan THL	20 persen 4 Orang	20.000.000
	8.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											

			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>			10 Orang		15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20.000.000
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Tersediannya Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor		12 Bulan 100 persen		84.100.000		Tersediannya Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan 100 persen	117.600.000
8.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>			1 Paket		1.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000
8.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor		8 Paket	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	80.000.000
8.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>			12 Dokumen	1.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000
8.01.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>			12 Laporan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000
8.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>			12 Laporan		8.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000
8.01.01.2.06.001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>			2 Dokumen		3.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	7.200.000
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>tersediannya Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah</i>		Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor		100 %		25.330.000			<i>tersediannya Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah</i>	100 %	18.000.000
8.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>			4 Unit		25.330.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	18.000.000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</i>	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor			100 persen		271.868.000			Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	292.578.000
8.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan		200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	200.000
8.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>			12 Laporan		51.120.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.120.000
8.01.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>			12 Laporan		12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.000.000
8.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>			12 Laporan		208.548.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	228.258.000

8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor		100 %		183.000.000			Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	204.000.000
8.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>			15 Unit		170.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	15 Unit	190.000.000
8.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>			15 Unit		8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	15 Unit	9.000.000
8.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>			1 Unit		5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000
2,	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	<i>Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan</i>	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	31,90 per 10.000 penduduk			650.856.000			<i>Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan</i>	31,90 per 10.000 penduduk	850.000.000
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah rekomendasi terkait Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang ditindaklanjuti</i>			12 Dokumen		650.856.000			Jumlah rekomendasi terkait Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang ditindaklanjuti	12 Dokumen	850.000.000
	8.01.02.2.01.001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											

			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>				12 Dokumen		18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	12 Dokumen	90.000.000
	8.01.02.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				700 Orang		81.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	700 Orang	85.000.000
	8.01.02.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran											

		Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>			12 Laporan		2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	5.000.000
	8.01.02.2.01.008	Pembentukan Paskibraka											
			<i>Jumlah Paskibraka</i>			31 Orang		548.456.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Paskibraka	31 Orang	670.000.000
3,	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	<i>Cakupan masyarakat yang memperoleh Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</i>	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor		31,90 per 10.000 penduduk		2.013.713.000			Cakupan masyarakat yang memperoleh Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	31,90 per 10.000 penduduk	1.964.129.000

8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Jumlah rekomendasi terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik yang ditindaklanjuti</i>			12 Dokumen		2.013.713.000			Jumlah rekomendasi terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik yang ditindaklanjuti	12 Dokumen	1.964.129.000
8.01.03.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>			27 Orang	1.909.129.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	27 Orang	1.909.129.000
	8.01.03.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>			768 Orang		102.084.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	768 Orang	50.000.000
	8.01.03.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											

			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>			12 Laporan	2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	5.000.000
4,	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	<i>Persentase ormas yang terbina</i>	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	100 persen		758.266.000			<i>Persentase ormas yang terbina</i>	100 persen	655.000.000
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Jumlah Rekomendasi Terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti</i>			12 Dokumen	758.266.000			Jumlah Rekomendasi Terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	655.000.000
	8.01.04.2.01.001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas										

		Asing di Daerah											
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun</i>			12 Dokumen		207.766.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	250.000.000
	8.01.04.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>			1000 Orang		548.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1000 Orang	400.000.000
	8.01.04.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											

			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>			12 Laporan		2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	5.000.000
5,	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	31,9 Per 10.000 penduduk			153.650.000			Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya	31,9 Per 10.000 penduduk	212.000.000
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Jumlah rekomendasi terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti</i>			12 Dokumen		153.650.000			Jumlah rekomendasi terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti	12 Dokumen	212.000.000
	8.01.05.2.01.001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											

			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</i>			12 Dokumen	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	46.000.000
	8.01.05.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>			900 Orang	113.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	900 Orang	150.000.000
	8.01.05.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi										

		Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>			20 Orang		9.050.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 Orang	15.000.000
	8.01.05.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat</i>			12 Laporan		1.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	12 Laporan	1.000.000

			<i>Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>								Kepercayaan di Daerah		
6,	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>Jumlah potensi konflik sosial yang terpantau</i>	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor		35 potensi		1.147.990.000			Jumlah potensi konflik sosial yang terpantau	35 potensi	1.322.750.000
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>umlah laporan bulanan potensi kerawanan sosial dan Jumlah laporan deteksi dini konflik yang terjadi di wilaya</i>			12 Laporan		1.147.990.000			umlah laporan bulanan potensi kerawanan sosial dan Jumlah laporan deteksi dini konflik yang terjadi di wilaya	12 Laporan	1.322.750.000
	8.01.06.2.01.001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											

			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>			12 Dokumen	423.930.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	450.000.000
	8.01.06.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi</i>			108 Orang	414.520.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	108 Orang	450.000.000

			<i>Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>										
	8.01.06.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,</i>			12 Laporan		60.150.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	62.750.000

			<i>serta Penanganan Konflik di Daerah</i>										
	8.01.06.2.01.006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>			12 Dokumen		249.390.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	12 Dokumen	360.000.000
J U M L A H								7.214.629.000					7.703.857.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2025.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

1. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
2. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap Program/Kegiatan yang diajukan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Segera dilakukan Penetapan terhadap Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Amin.

Purbalingga,

2024

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA

